



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
WILAYAH JAWA BARAT

ISSN-SNAB-2252-3936



PROCEEDINGS

**PROFESIONALISME AKUNTAN MENUJU
SUSTAINABLE BUSINESS PRACTICE**

KAMIS, 20 JULI 2017 | BANDUNG, JAWA BARAT

Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)

Ekasari Sugiarti¹, Ivan Yudianto²

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Survei pada penelitian ini dikhususkan hanya pada desa-desa di wilayah kecamatan Klari, Karawang Timur, Majalaya, dan Rengasdengklok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner ke desa-desa di empat kecamatan sebanyak 64 kuisioner, dengan respondennya yaitu kepala desa dan sekretaris desa. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda yang dibantu dengan software SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan persentase pengaruh sebesar 0,1981 atau 19,81%; (2) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dengan persentase pengaruh sebesar 0,2197 atau 21,97%; (3) Partisipasi Anggaran berpengaruh signifikan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dengan persentase pengaruh sebesar 0,5324 atau 53,24%; dan sisanya sebesar 4,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.

Kata kunci : Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Akuntabilitas dan Dana Desa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors of human resources competences, utilization of information technology and budgetary participation on accountability of village fund management. Survei in this study was devoted only to villages in the Klari, East Karawang, Majalaya and Rengasdengklok districts. The research method used in this study is descriptive-quantitative by spreading questionnaires to villages in four sub-districts of 64 questionnaires, with respondents namely the village head and the village secretary. Data analysis method used is Multiple Linear Regression which assisted with SPSS software.

The results of this study indicate that: (1) Human Resource Competence has significant effect on Accountability of Village Fund Management with percentage of influence equal to 0,1981 or 19,81%; (2) Utilization of Information Technology significantly influence Accountability of Village Fund Management, with percentage of influence equal to 0,2197 or 21,97%; (3) Budget Participation has significant influence on Management Accountability of Village Fund Management, with percentage of influence equal to 0,5324 or 53,24%; And the balance of 4,9% influenced by other factors not observed in this research.

Keywords: *Human Resources, Utilization of Information Technology, Participation Budgeting, Accountability and Village Funds.*

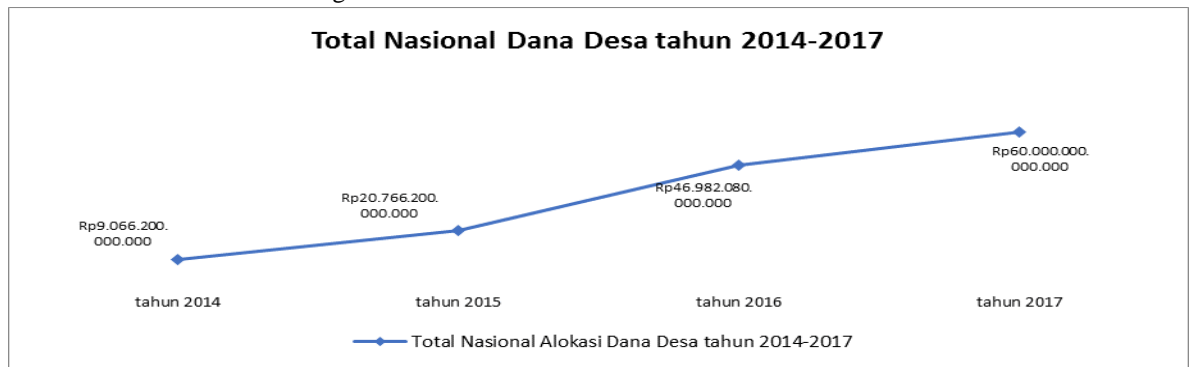
1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini telah memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan di sektor desa yaitu dengan pemberian dana desa langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat dari pinggiran dan desa-desa.

Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia di bidang pembangunan terutama peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan di jajaran desa dapat dilihat dari tingkat kenaikan alokasi dana desa yang diberikan pemerintah kepada seluruh desa yang ada di Indonesia. Semenjak awal tahun 2016 dana desa telah dinaikkan jumlahnya menjadi Rp. 46.900.000.000.000 atau dua kali lipat lebih besar dibanding 2015 yang hanya sebesar Rp. 20.700.000.000.000. Dari adanya kenaikan jumlah pengalokasian dana desa maka setiap desa akan mengelola uang atau dana desa secara mandiri sebesar Rp. 500.000.000 hingga Rp. 800.000.000 per desa.

Grafik 1.1

Peningkatan Total Nasional Dana Desa tahun 2014-2017



Sumber: Kementerian Keuangan, Kementerian Desa (data diolah)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa di tahun 2016 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai Permendes 21 tahun 2015, prioritas pertama penggunaan dana desa yaitu untuk membangun infrastruktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud (penahan tanah agar tidak longsor). Bidang kesehatan dan pendidikan juga perlu diprioritaskan, diantaranya Posyandu dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Diketahui bahwa alokasi APBN merupakan salah satu sumber pendapatan bagi desa. Setelah diberlakukan pada tahun 2015 dimana hal ini tergolong baru maka pengawasan dari pelaksanaan dana desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) harus dijaga dengan ketat. Ketika dikaitkan dengan salah satu tulisan Salvatore Schiavo-Campo dan Daniel Tommasi (1999) yang berjudul *Managing Government Expenditure* maka pengawasan dana desa ini dikategorikan kepada kepentingan publik yang berupa transparansi, akuntabilitas, dan orientasi kepada kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, berikut identifikasi masalah penelitian ini:

- Apakah faktor kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- Apakah faktor pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- Apakah faktor partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sehingga diperoleh hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- H2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- H3 : Partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- H4 : Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi penganggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (faristina, 2011).

Menurut Romney et al. (2014) salah satu dari kekuatan pengendalian internal terbesar adalah kejujuran pegawai. salah satu kelemahan pengendalian terbesar adalah ketidakjujuran pegawai. Kebijakan sumber daya manusia dan praktik-praktik yang mengatur kondisi kerja, insentif pekerjaan dan kemajuan karier dapat menjadi kekuatan dalam mendorong kejujuran, efisiensi dan layanan yang loyal. Kebijakan sumber daya manusia harus berisi tingkatan keahlian yang diperlukan, perilaku etis dan integritas yang diperlukan. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Selanjutnya, didalam era globalisasi saat ini hal yang tidak kalah pentingnya adalah pemanfaatan teknologi informasi bagi organisasi-organisasi baik swasta maupun pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan organisasi dengan alasan sebagai berikut:

- a. meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen,
- b. adanya pengaruh ekonomi internasional (globalisasi),
- c. perlunya waktu tanggap (*respons time*) yang lebih cepat,
- d. tekanan akibat dari persaingan bisnis.

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Selain faktor sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dapat membantu dalam upaya pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan, terdapat faktor lain yang dapat dijadikan faktor pengendalian agar manajer atau atasan dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien (Schief dan Lewin, Welsch, Hilton dan Gordon dalam Ikhsan (2007:2)). Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian jika dalam penyusunannya melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran. Pihak-pihak yang dimaksud adalah atasan (*principal*) dan bawahan (*agent*). Anggaran yang bermanfaat tidak hanya dapat dan mampu membantu mempererat kerja sama antarkaryawan, memperjelas kebijakan, dan merealisasikan rencana, tetapi juga dapat menciptakan keselarasan yang optimal dalam perusahaan dan keserasian tujuan antara atasan dan bawahan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan. Jika tidak diperhatikan, maka dapat menimbulkan *dysfunctional behavior* atau perilaku individual yang bertentangan dengan tujuan organisasi.

Kuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sifat pengelolaannya, keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Menurut Riyanto (2015) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporandengan prinsipbahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang–undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai–nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.

Metode Penelitian ini terfokus analisis faktor kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas dana desa. Melihat dari adanya variabel dan dengan pertimbangan tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, maka penelitian pendekatan deskriptif dengan metode penelitian adalah metode kuantitatif.

Unit analisis dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti, maka dari itu fokus pada penelitian ini adalah desa. Menurut Sugiyono (2011:61), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas suatu objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh desa di tiga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok.

Mengingat jumlah populasi pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok relatif terbatas, maka untuk menjamin keakuratan data penulis menetapkan seluruh anggota populasi yang ada sebagai sampel penelitian, dengan menggunakan metode sensus. Pertimbangan peneliti menggunakan metode sensus dalam penentuan sampel penelitian merujuk kepada pendapat Sugiyono (2011:85), yang mengemukakan bahwa metode sensus dalam suatu riset penelitian digunakan jika jumlah populasi penelitian relatif terbatas. Biasanya populasi penelitian jumlahnya kurang dari 100 subjek, dimana dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 33 sampel yang akan di teliti.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda (multiple regression) yang bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (explanatory) terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2011). Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = kualitas laporan keuangan

- α = konstanta
- β_1 = koefisien regresi sumber daya manusia
- β_2 = koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi
- β_3 = koefisien regresi partisipasi penganggaran
- X1 = variabel sumber daya manusia
- X2 = variabel pemanfaatan teknologi informasi
- X3 = variabel partisipasi penganggaran
- e = variabel pengganggu

2. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari uji validitas Pada keempat variabel disetiap item pertanyaan terlihat bahwa seluruh item pernyataan pada masing-masing variabel memiliki koefisien validitas yang lebih besar dari r-kritis 0,3, sehingga item-item tersebut yakni sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran dan akuntabilitas layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian.

Hasil dari uji reliabilitas menunjukkan nilai reliabilitas butir pernyataan pada kuesioner masing-masing variabel yang sedang diteliti lebih besar dari 0,7. Hasil ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan pada kuesioner andal untuk mengukur variabelnya

Berdasarkan *output* SPSS di atas diperoleh nilai *Sig.* uji normalitas dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,070. Dikarenakan nilai *p-value* tersebut lebih besar dari alpha (0,070 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

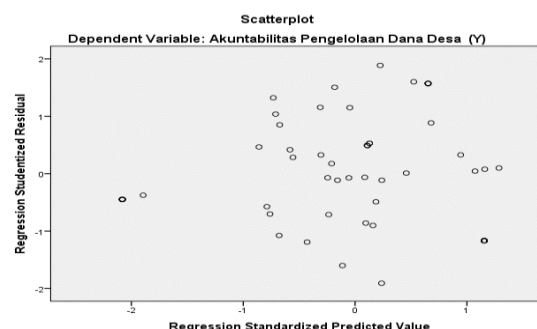
Tabel 1.1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			64
Normal Parameters a,b	Mean		,0000000
	Std. Deviation		1,63380123
Most Extreme Differences	Absolute		,106
	Positive		,106
	Negative		-,092
Test Statistic			,106
Asymp. Sig. (2-tailed)			,070 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil uji heterokedastisitas Dari masing-masing gambar terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola. Serta titik-titik menyebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak dipakai untuk analisa berikutnya

Gambar 1.1 Hasil Uji Heteriskedastisitas



Hasil Uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas dibawah 10, yakni Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₁) = 4,447, Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₂) = 7,382 dan Partisipasi Penganggaran (X₃) = 6,737. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas dalam model.

Tabel 4.2 Nilai VIF Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	,074	4,447
	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	,135	7,382
	Partisipasi Penganggaran (X3)	,148	6,737

^a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Hasil uji regresi linier berganda disajikan berdasarkan *output* di atas didapat nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,939 + 0,127X_1 + 0,171X_2 + 0,843X_3$$

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

$a = 0,939$ artinya jika Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) dan Partisipasi Penganggaran (X_3) bernilai nol (0), maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana (Y) akan bernilai 0,939 satuan;

$b_1 = 0,127$ artinya jika Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana (Y) akan meningkat sebesar 0,127 satuan;

$b_2 = 0,171$ artinya jika Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana (Y) akan meningkat sebesar 0,171 satuan;

$b_3 = 0,843$ artinya jika Partisipasi Penganggaran (X_3) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana (Y) akan meningkat sebesar 0,843 satuan.

Setelah diketahui nilai R sebesar 0,830, maka koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} KD &= R^2 \times 100\% \\ &= (0,830^2 \times 100\%) \\ &= 95,1\% \end{aligned}$$

Dengan demikian, maka diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 95,1% yang menunjukkan arti bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) dan Partisipasi Penganggaran (X_3) memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 95,1% terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y), sedangkan sisanya sebesar 4,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.

Tabel 1.3 Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,975 ^a	,951	,949	1,67415

^a. Predictors: (Constant), Partisipasi Penganggaran (X3), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

^b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Hasil perhitungan persentase secara parsial, maka dapat diketahui bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) memberikan pengaruh positif sebesar 0,1981 atau 19,81% terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa (Y), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₂) memberikan pengaruh positif sebesar 0,2197 atau 21,97% terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) dan Partisipasi Penganggaran (X₃) memberikan pengaruh positif sebesar 0,5324 atau 53,24% terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

Tabel 2.5 Koefisien Beta x Zero-Order

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Correlations		
	B	Std. Error	Beta	Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	,939	,937				
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	,127	,063	,209	,948	,250	,057
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	,171	,055	,241	,912	,374	,089
Partisipasi Penganggaran (X3)	,843	,112	,557	,956	,698	,215

^a Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Analisis Faktor Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis statistik didapatkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia (X1) memiliki nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel yaitu (2,004 > 2,000) dan taraf signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 (0,050 < 0,05). Maka hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa atau dengan kata lain hipotesis (H1) diterima

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin bagus kualitas kompetensi sumber daya manusia, maka semakin bagus pula akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan Ariesta (2013).

Di Kabupaten Karawang itu sendiri pemerintah daerah selalu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk perangkat desa yang dimilikinya. Seperti misalnya, pelatihan mengenai perkembangan IT (Informasi Teknologi), pelatihan Ibu-ibu PKK, pelatihan menuju kampung bersih, dan terutama pelatihan mengenai tata cara dan pengelolaan dana desa setiap tahunnya.

Analisis Faktor Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis statistik didapatkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia (X2) memiliki nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel yaitu (3,123 > 2,000) dan taraf signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 (0,003 < 0,05). Maka hal ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa atau dengan kata lain hipotesis (H2) diterima.

Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Saat ini penggunaan teknologi informasi pada pemerintahan desa terutama di desa-desa di empat wilayah penelitian sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya komputer dengan jumlah yang cukup di setiap desa. Komputer ini digunakan sebagai alat bantu kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah desa. Sehingga aparatur desa mampu untuk menginput data secara lebih cepat daripada menggunakan cara manual. Penggunaan komputer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Selain itu, peraturan Bupati Karawang mengenai setiap desa wajib memiliki perangkat komputer minimal dua buah mengharuskan setiap desa harus paham mengenai tata cara penggunaannya.

Wahyudi (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik secara garis besar dapat memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Analisis Faktor Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis statistik didapatkan bahwa variabel partisipasi penganggaran (X_3) memiliki nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel yaitu ($7,547 > 2,000$) dan taraf signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka hal ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi penganggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa atau dengan kata lain hipotesis (H_3) diterima.

Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam membantu dan memonitoring pemerintahan desa dalam penyusunan anggaran sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari secara rutusnya setiap seminggu sekali aparatur desa selalu mengadakan acara minggon (rapat rutin mingguan) yang dihadiri oleh seluruh aparatur desa, para sesepuh desa, kepala dusun, serta RT (Rukun Tetangga) di setiap dusunnya untuk mengevaluasi setiap anggaran yang akan diajukan untuk anggaran dana desa tahun selanjutnya serta mengevaluasi anggaran yang telah dilaksanakan.

Rapat minggon ini tidak hanya diselenggarakan oleh pihak desa saja. Setiap dua minggu sekali pihak kecamatanpun rutin melakukan rapat minggon guna menunjang kebiasaan para aparatur desa untuk bersikap terbuka jujur dalam melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan di setiap desa. Selain kecamatan, pihak kabupaten pun selalu rutin melaksanakan minggon setiap tiga minggu sekali atau sebulan sekali yang biasanya dilaksanakan di pelataran balai kabupaten. Dimana rapat ini tidak hanya dihadiri oleh para aparatur pemerintahan saja tetapi juga dihadiri oleh dinas-dinas terkait yang sedang menjalankan suatu program dan juga masyarakat umum sebagai sarana publikasi hasil kinerja aparatur pemerintahan.

Penelitian ini telah didukung oleh teori dari Asian Development Bank (1999) memandang bahwa masyarakat merupakan jantungnya pembangunan. Masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat atas hasil pembangunan. Melainkan, masyarakat adalah agen pembangunan itu sendiri yang berperan dan terlibat dalam pembentukan.

Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis statistik didapatkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2) dan partisipasi penganggaran (X_3) memiliki nilai f-hitung yang lebih besar dari f-tabel yaitu ($391,714 > 3,150$) dan taraf signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi penganggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa atau dengan kata lain hipotesis (H_4) diterima.

Dan dari hasil perolehan nilai koefisien determinasi sebesar 95,1% yang menunjukkan arti bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) dan Partisipasi Penganggaran (X_3) memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 95,1% terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y), sedangkan sisanya sebesar 4,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.

3. Simpulan dan Saran

3.1 Simpulan

Dari hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan persentase pengaruh sebesar 0,1981 atau 19,81%, hal ini menunjukkan bahwa walaupun jika dilihat dari dasar pendidikan para sekretaris dan kepala desa rata-rata menunjukkan strata pendidikan SMA, namun kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dikalangan aparatur pemerintahan desa telah baik. Hasil tersebut didukung dengan sering diadakannya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pihak kecamatan.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dengan persentase pengaruh sebesar 0,2197 atau 21,97%, hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dikalangan pemerintahan desa tidak begitu mendominasi hal ini dikarenakan masih kurangnya akses internet dan sebenarnya di Kabupaten Karawang telah mencanangkan setiap desa wajib memiliki seperangkat alat komputer minimal 1 buah untuk kegiatan operasional desa, dan hal ini yang menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan karena bagi aparatur desa penggunaan perangkat komputer hanya digunakan untuk bagian surat menyurat.
3. Partisipasi Anggaran berpengaruh signifikan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dengan persentase pengaruh sebesar 0,5324 atau 53,24%, hasil ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dan pemangku kepentingan di desa dapat memberikan partisipasi yang baik untuk keberlangsungan kegiatan anggaran desa. Hal ini didukung dengan adanya rapat rutin mingguan yang diadakan oleh setiap desa yang dinamakan rapat minggon, dimana dalam forum rapat tersebut para anggota forum dapat mengemukakan pendapat terkait dengan pendanaan yang akan diterima oleh desa dan selanjutnya akan dijadikan bahasan mengenai penyusunan anggaran untuk program yang di danai oleh pendanaan tersebut.
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Anggaran secara bersama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dengan total pengaruh sebesar 95,1% sedangkan sisanya sebesar 4,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini. Secara simultan ketiga variabel yang diuji menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini di dasari dengan komunikasi dan pembinaan yang cukup baik antara aparatur desa dengan perwakilan dari Kemendesa selaku pembina dari penggunaan dana desa.

3.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah ditulis sebelumnya maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Melengkapi metode survei dengan wawancara untuk meningkatkan keseriusan dan kepedulian responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuisisioner. Dan untuk mengurangi subjektivitas dari responden yang bisa mengakibatkan hasil penelitian menjadi rentan terhadap biasnya jawaban responden.
2. Jika penelitian selanjutnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa mungkin dapat menambahkan faktor analisis yang lain yang tidak di analisis dalam penelitian ini. Seperti faktor pengendalian internal, faktor perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah, faktor sebab-akibat kumulatif srikuler, dan faktor lainnya.
3. Saat melakukan penelitian lapangan diharapkan selalu mencatat nomor telepon/ kontak yang dapat dihubungi. Sehingga peneliti selalu melakukan *reminder* atau mengingatkan kepada pihak desa agar saat kuisisioner telah disebar dan akan diambil kembali, kuisisioner tersebut dalam keadaan telah siap untuk diambil dan peneliti tidak perlu menunggu jikalau masih ada kuisisioner yang belum terisi.
4. Langkah lebih baik jika ingin melakukan penelitian ke desa-desa untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan, sehingga pihak kecamatan dapat membantu mengumpulkan para aparatur desa di satu tempat. Hal tersebut dapat meminimalisir terbuangnya waktu untuk mencari alamat desa yang jauh dan sulit untuk diakses

4. Daftar Pustaka

- [1]. *Asian Development Bank*. 1999. Governance : Sound Development Management dalam "Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi". Opcit.
- [2]. Azwardi; Sukanto. 2014. *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*. J. Ekonomi Pembangunan ISSN 1829-5843.

- [3]. Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas & Depdagri 2002, hal 20. dalam “*Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*” Oleh : Dra.Loina Lalolo Krina P
- [4]. Brownell.P, 1982a. Participation in Budgeting Process; when it works and it doesn't. *Journal of Accounting Literature*, Vol 1: 124-153
- [5]. Bruns, W. J. Jr., dan J. H. Waterhouse. 1975. Budgetary Control and Organization Structure, *Journal of Accounting Research* (Autumn 1975), pp.177-203
- [6]. Cherrington, D. J.; dan J. O. Cherrington. 1973. Appropriate Reinforcement Contingencies in the budgeting Process. *Journal of Accounting Research* pp. 225-253
- [7]. Collins, F. 1978. The Interaction of Budget Characteristics and Personality Variables with Budgetary Response Attitudes, *The Accounting Review* pp. 324-335.
- [8]. Dantes, N. (2012). In *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- [9]. Faristina, Rosalin. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro, Di unduh dari <http://eprints.undip.ac.id>.
- [10]. French, J.R.P.Jr.; E. Kay; dan H. H. Meyer. 1966. Participation and the Appraisal System, *Human Relations*. pp 3-20.
- [11]. Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- [12]. Griffin, Ricky W. 2004. Manajemen edisi ketujuh jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- [13]. Haag, S; Cummings, M; and Dawkins, J. 1998. Management Information Systems for the Information Age. USA. McGraw-Hill.
- [14]. Hevesi,G.Alan. 2005. Standards for Internal Control in New York State Government. Tersedia www.osc.state.ny.us
- [15]. Irma, Ade 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi asal Universitas Tadulako. *J. Akuntansi* ISSN 2302-2019
- [16]. Latuheru, Belianus Patria. (2005). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.7, No.2, Nopember 2005, hal:117-130.
- [17]. Leach-Lopez, M. A., W.W. Stammerjohan, F.M. McNair. 2007. Differences in the Role of Job Relevant Information in the Budget Participation- Performance Relationship among U.S. and Mexican Managers: A Question of Culture or Communication. *Journal of Management Accounting Research*. Vol. 19, hlm. 105-136.
- [18]. Mardiasmo. 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Journal. Akuntansi Pemerintahan Vol. 2 No. 1*.
- [19]. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi
- [20]. Milani, K. 1975. The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A field Study. *The Accounting Review* Hal. 274-284.
- [21]. OECD (2016). World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2016-2017. [Online]. Tersedia: <http://www.oecd.org/economy/surveys/economic-survey-indonesia.html> (diakses 20 Februari 2017).
- [22]. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) Nomor 21 Tahun 2015 Tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- [23]. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Kualitas Hidup Manusia Serta Penanggulangan Kemiskinan*.
- [24]. Partono. 2000. Laporan Keuangan Pemerintah: Upaya Menuju Transparansi dan Akuntabilitas. Media Akuntansi.
- [25]. Raka, Mang (2016, 13 Oktober). Pembangunan Terhambat ADD Desa Klari Belum Cair. Radar Karawang [Online]. Tersedia: <http://www.radar-karawang.com/2016/10/pembangunan-terhambat-add-des-klari.html> (diakses 20 Februari 2017)
- [26]. Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia

- [27]. Romney, Marshal R. & Paul John Steinbart. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- [28]. Schiff, M.; dan A.Y. Lewin. 1970. The Impact of People on Budgets. *The Accounting Review* 45 259-268.
- [29]. Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis 2 Edisi 4*. Jakarta. Salemba Empat .
- [30]. Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta
- [31]. _____ 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.